e-ISSN 2798-8961

Hita Akuntansi dan Keuangan
Universitas Hindu Indonesia
Edisi April 2024

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Gianyar

I Gusti Ayu Putu Natih Swari[(1)]
Ni Komang Sumadi[(2)]
Ni Ketut Muliati[(3)]
[(1)(2)(3)]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sanggalangit, Tembau Penatih, Denpasar Timur
e-mail: klikayu09@gmail.com

ABSTRACT

Accountability for village fund management is a form of village government accountability in managing Village Funds carried out in accordance with procedures, policies and applicable laws and regulations in accordance with the principles of village fund financial management. This study aims to determine the characteristics of clarity of budget targets, internal control system, accessibility of financial statements and community participation in accountability of village fund management in villages throughout Gianyar sub-district. The number of samples used was 95 people using the purposive sampling method. Data collection using questionnaires. The data analysis technique uses multiple linear regression tests. The hypothesis test used is the t test. The results showed that Clarity of Budget Targets has a positive and significant influence on Village Fund Management Accountability. The Internal Control System has a positive and significant influence on Village Fund Management Accountability. The accessibility of Financial Statements has a positive and significant influence on Village Fund Management Accountability. Community Participation has a positive and significant influence on Village Fund Management Accountability. It is hoped that the Village in Gianyar District can evaluate and supervise so that the budget that has been used can be clearly written with evidence on every activity funded by the budget so that accountability of village funds can be managed properly.

Keywords: Clarity, Internal, Accessibility, Participation.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan Nasional. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan desa untuk mengacu atau menyelenggarakan pemerintahannya dan keuangannya sendiri. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh

mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Permen RI No 60 2008). Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa juga mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Faktor ini mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Aksesibilitas terhadap laporan keuangan juga merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan.

Penggunaan dana desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Ni Wayan Sinaryati mengatakan, pemerintahan desa saat ini menjadi pusat perhatian. Sebab mendapat dana yang besar dari pemerintah pusat sebagai perpanjangan tangan pembangunan di tingkat desa. Beliau juga mengatakan bahwa tidak ingin lagi mendengar ada pembangunan desa dan kepentingan masyarakat yang terhambat dikarenakan ada perbekel yang ragu-ragu atau takut menggunakan dana desa karena khawatir dalam mengelola anggaran desa. Maka dari itu, beliau bersama dengan Kepala Desa (kades) se-Kabupaten Gianyar melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU), dimana hal ini dilakukan untuk antisipasi tersandung hukum dalam memanfaatkan dana desa dan juga MOU tersebut bersifat pendampingan untuk mengantisipasi penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

Penandatanganan MoU antara 64 kepala desa dengan Kejaksaan Negeri Gianyar merupakan awal dalam membangun koordinasi dan komunikasi, guna mewujudkan optimalisasi pembangunan desa sesuai dengan kegunaannya untuk masyarakat. Serta merupakan bentuk kerjasama dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap penyaluran serta penggunaan anggaran dana desa. Kerjasama tersebut bukan berarti memberi perlindungan bagi aparatur desa untuk mendapat kekebalan hukum, melainkan melindungi dan mengawal dana desa agar tidak salah sasaran. Perjanjian kerjasama ini bukan sebagai bentuk hak perlindungan bagi aparatur desa

untuk mendapatkan kekebalan hukum jika terjerat dengan masalah hukum, tetapi Kejaksaan hadir untuk melindungi dan mengawal dana desa agar tidak terjadi salah sasaran dalam mengambil kebijakan dan diharapkan agar kepala desa tidak ada yang terjerat atau bermasalah dengan hukum (Tribun Bali 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, aksebilitas laporan keuangan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Se- Kecamatan Gianyar.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini didukung oleh teori *agency* dan teori *stewardship.* Teori keagenan merupakan sebuah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent.* Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang *(principal)* dan pihak yang menerima wewenang *(agent)* yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Implikasi teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang *(agent)* oleh pemerintah pusat dan daerah *(principal)* untuk mengelola dana desa. Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya suatu penyelewengan atau korupsi oleh pihak agen.

Penelitian ini juga didukung oleh teori *stewardship*. Menurut (Donaldson dan Davis 1991), teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang dimana tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat sebagai prinsipalnya. Asumsi filosofi teori ini berdasarkan sifat-sifat manusia yaitu dapat dipercaya, berintegritas, bertanggungjawab dalam setiap tindakannya dan jujur.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa yang dilakukan sesuai prosedur, kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dana desa (Supadmi dan Suputra 2018).

Anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran memberikan tujuan dalam setiap penyusunannya pada sebuah organisasi. Tujuan pada penyusunan anggaran dapat mengkomunikasikan dan mengendalikan berbagai aspek baik secara financial maupun terkait operasional dari berbagai divisi. Kejelasan sasaran anggaran merupakan suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup perusahaan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehubungan dengan fungsi pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan (Permen RI No 60 2008). Selanjutnya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi desa merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, dimana SPIP ini merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggrakan secara menyuluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemeritah daerah.

Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip *good governance*, karena salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance* adalah aksesibiltas laporan keuangan yang baik. Pemerintah desa harus bersikap transparan dalam kegiatan apapun yang menggunakan dana desa. Pemerintah desa juga harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar hanya menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak aparat desa saja akan tetapi memfasilitasi masyarakat desa agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Hasan 2017).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih tertuju dengan kepentingan riil dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliastuti & Riharjo (2020), Krisnawati dkk (2020), Atiningsih & Ningtyas (2019), Polutu (2022), Indriasih dkk (2022), Sujatnika & Sulindawati (2022), Prestya & Pesudo (2022), telah membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, aksebilitas laporan keuangan, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana pengelolaan dana desa. Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah di uraikan sebelumnya maka hipotesis yang dapat di ajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 = Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2 = Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3 = Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H4 = Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergololong penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuisioner. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran itu sendiri ditetapkan secara spesifik dan jelas serta dapat dimengerti pengelolanya. Faktor SPI digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas laporan keangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Faktor partisipasi masyarakat mempengaruhi keberhasilan dari program dari pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang

digunakan adalah *NonProbability Sampling* dengan metode *Purposive Sampling.* Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 responden.

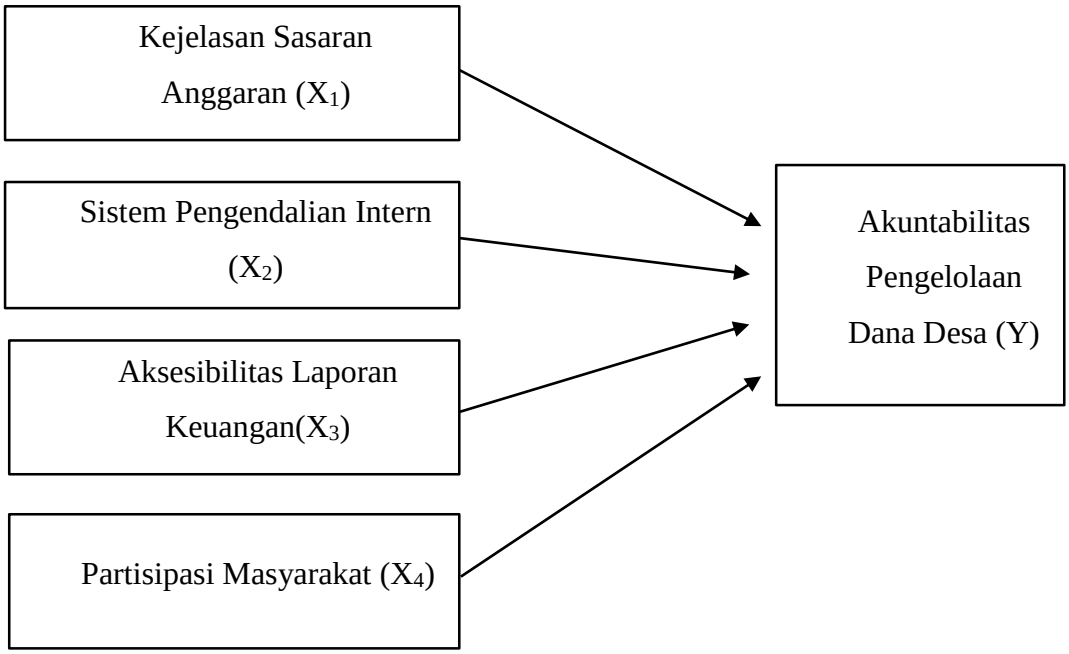

Gambar 1. Kerangka berpikir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Analisis Statistik Desktiptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	95	26,0	35,0	31,179	2,7249
Sistem Pengendalian Intern (X2)	95	32,0	45,0	39,547	3,5723
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	95	10,0	15,0	13,337	1,3653
Partisipasi Masyarakat (X4)	95	12,0	20,0	15,958	2,0931
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	95	29,0	40,0	34,905	3,2093

Sumber : data diolah, 2023

Nilai minimum dari Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) sebesar 26,0, nilai maksimum 35,0 serta rata-rata sebesar 31,179 dan standar deviasi 2,7249. Nilai minimum dari variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) sebesar 32,0 nilai maksimum 45,0 serta rata-rata sebesar

39,547 dan standar deviasi 3,5723. Nilai minimum dari variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) sebesar 10,0, nilai maksimum 15,0 serta nilai rata-rata sebesar 13,337 dan standar deviasi 1,3653. Nilai minimum dari variabel Partisipasi Masyarakat (X4) sebesar 12,0, nilai maksimum 20,0 serta nilai rata-rata sebesar 15,958 dan standar deviasi 2,0931. Nilai minimum dari variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 29,0, nilai maksimum 40,0 serta nilai rata-rata sebesar 34,905 dan standar deviasi 3,2093.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Variabel	Nilai r Minimal	Ke te rangan	Nilai Cronbach Alpha	Ke te rangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,691	Valid	0,882	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0,589	Valid	0,884	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	0,801	Valid	0,747	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X4)	0,619	Valid	0,744	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,650	Valid	0,885	Reliabel

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2 seluruh variabel memiliki nilai r > 0,30 dan Cronbach Alpha > 0,60 maka variabel dapat dinyatakan telah memenuhi asumsi validitas dan reliabilitas.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas *(sig. 2 tailed)*	Multikolonearitas		Heteroke dastisitas (sig. 2 tailed-Abres)
		Tole rance	VIF	
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,111	0,310	3,225	0,171
Sistem Pengendalian Intern (X2)		0,224	4,468	0,999
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)		0,365	2,738	0,069
Partisipasi Masyarakat (X4)		0,629	1,590	0,761

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, pada bagian normalitas memiliki nilai sig 0,111 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual atau model regresi berdistribusi normal. Bagian Multikolonearitas, nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Bagian Heterokedastisitas, menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen nilai absolut residual *(Abres)*. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung Heterokedastisitas.

Tabel 4. Tabulasi Output SPSS

Variabel	Unstandardized Beta	t-Hitung	Probabilitas (sig.)	Keterangan
Konstanta	0,915	0,535	0,594	
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,279	2,958	0,004	Signifikan
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0,398	4,705	0,000	Signifikan
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	0,364	2,102	0,038	Signifikan
Partisipasi Masyarakat (X4)	0,294	3,414	0,001	Signifikan
Adjusted R Square		0,813		
F Statistik		103,404		
Probabilitas (p-value)		0,000		
Variabel Dependen	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)			

Sumber : data diolah, 2023

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Nilai *adjusted R square* sebesar 0,813 menunjukkan bahwa 81,3% variasi nilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dapat dijelaskan oleh Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) dan Partisipasi Masyarakat (X4). Sedangkan sisanya sebesar 18,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini seperti *Good Governance,* Pengawasan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Uji Signifikasi Nilai t

1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki koefisien positif sebesar 0,279 dengan nilai signifikasi sebesar 0,004 < 0,05 berarti Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh terhadap Akuntanbilitas Pengelolaan Dana Desa. Hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima dan H_0 di tolak.

2. Variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki koefisien positif sebesar 0,398 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 berarti Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh terhadap Akuntanbilitas Pengelolaan Dana Desa. Hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima H_0 di tolak.
3. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki koefisien positif sebesar 0,364 dengan nilai signifikasi sebesar 0,038 < 0,05 berarti Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh terhadap Akuntanbilitas Pengelolaan Dana Desa. Hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima H_0 di tolak.
4. Variabel Partisipasi Masyarakat memiliki koefisien positif sebesar 0,294 dengan nilai signifikasi sebesar 0,001 < 0,05 berarti Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh terhadap Akuntanbilitas Pengelolaan Dana Desa. Hipotesis 4 dalam penelitian ini diterima H_0 di tolak.

Uji Signifikasi Nilai F

Hasil pengujian *p-value* menunjukkan nilai --0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) dan Partisipasi Masyarakat (X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan (1). Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (2). Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (3). Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (4). Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yaitu pihak Desa lebih meningkatkan kejelasan sasaran anggaran langkah ini dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran jelas terhadap proses pengeluaran dana desa sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat terealisasi secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Atiningsih, Suci, dan Aulia Cahya Ningtyas. 2019. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 10(1): 2015–19.

Donaldson, Lex, dan James H. Davis. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns." *Australian Journal of Management* 16(1): 49–64.

Hasan, Nur Ahmad. 2017. "Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa." FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR.

Indriasih, Dewi, Aminul Fajri, dan Dinda Febriana. 2022. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3(4): 972–81.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. 51 Peraturan.Bpk.Go.Id *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Permen RI No 60. 2008. *Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.

Polutu, Adriansah, Mattoasi Mattoasi, dan Usman Usman. 2022. "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jambura Accounting Review* 3(2): 89–101.

Prestya, Aldian, dan David Adechandra Ashedica Pesudo. 2022. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dana Desa." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23(1): 1–20.

Putra, Deki. 2013. "Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)." *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*: 1–26.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.

Sujatnika, I Nyoman Jagra, dan Ni Luh Gede Sulindawati. 2022. "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidemen Kabuoaten Karangasem." *Jurnal Akuntansi Profesi* 13(2): 378–88.

Supadmi, N.L, dan D.G Dharma Suputra. 2018. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar." *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata* 13(2): 132–45.

Tribun Bali. 2022. "Antisipasi Penyimpangan, Kejari Gianyar Tandatangani MoU Pemanfaatan Dana Desa." *Tribun-Bali.com*.